

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Setelah penulis merancang sistem dengan beberapa tahapan, membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman berbasis web dan mengimplementasikan sistem kepada user/pengguna, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan terkait sistem yang telah diimplementasikan. Berikut akan dijelaskan kesimpulan yang terkait dengan implementasi sistem.

1. Dari hasil pengujian “Sistem Informasi Akuntansi Penerapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Pada PT PLN (Persero) UMK JMK IV Medan” menunjukkan bahwa sistem ini mampu untuk melakukan penambahan data rekanan, penambahan barang/jasa kena pajak, pencetakan laporan faktur pajak standar, pencetakan surat setoran pajak dan pencetakan laporan nominatif bulanan dan tahunan.
2. Dari hasil analisa dan implementasi yang dilakukan menunjukkan bahwa profil rekanan yang dibuat dapat membantu pihak PT PLN (Persero) UMK JMK IV Medan dalam melihat potensi dan prioritas pengembangan hubungan dengan rekanan.
3. Perancangan “Sistem Informasi Akuntansi Penerapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Pada PT PLN (Persero) UMK JMK IV Medan” dibantu dengan desain berorientasi objek yaitu pemodelan *Unified Modelling Language* (UML) yang meliputi Usecase Diagram, Activity

Diagram dan Sequence Diagram sehingga mempermudah untuk melakukan desain terhadap sistem ini

4. Sistem tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada relatifitas dengan sumber daya pengguna yang ada dan perangkat hardware sehingga tidak timbul suatu kendala dan cara mengatasi dengan prosedur dari tahapan-tahapan implementasi yang ada.

V.2. Saran

Berdasarkan kelemahan-kelemahan sistem dalam penerapannya terhadap pencatatan PPN Masukkan serta penyajiannya dalam laporan-laporan keuangan PT PLN (Persero) UMK JMK IV Medan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk sistem informasi akuntansi penerapan PPN dengan menambahkan beberapa objek baru, antara lain barang mewah kena pajak, aset-aset perusahaan yang dapat dikenakan pajak hingga pada pajak keluaran perusahaan.
2. Pembuatan laporan nominatif pada periode waktu sebaiknya dilakukan apabila setiap rekanan telah diberikan cetakan Faktur Pajak Standar dan Surat Setoran Pajak rangkap 2 yang dikeluarkan PT PLN (Persero) UMK JMK IV Medan dan disahkan oleh Direktorat Pajak wilayah terkait.
3. Penelitian ini dapat dimodifikasi sedemikian dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan terkait, sehingga sistem ini dapat digunakan juga pada perusahaan yang memiliki wajib pajak dalam setiap proses bisnisnya.